

MATRIK REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 - 2022

No	Perspektif/sasaran	Indikator	Parameter	Realisasi Tahun 2017	Rencana Aksi Tahun					Bentuk Regulasi/Aksi	Pengampu
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	MANAJEMEN PERUBAHAN										
1	Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi.	1.1 Terbentuknya Tim manajemen perubahan pada Pemda.	1.1.1 Tim manajemen Pengelola Perubahan telah terbentuk.		V	V				Sk Tim RB	Bag Organisasi
			1.1.2 Adanya Role model sebagai agen perubahan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan organisasi.	Role Model Pelayanan Publik dan WBK pada : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu; 3. RSUD Wates	V	V	V	V	V	Penetapan individu/SKPD sebagai role model	Bag Organisasi dan Semua SKPD
		1.2 Tersusunnya strategi manajemen perubahan Pemda.	1.2.1 Tersedianya dokumen perencanaan manajemen perubahan (RB) jangka menengah dan rencana kerja tahunan.	Sudah/Belum		V				Dokumen perencanaan manajemen perubahan	Bappeda, IRDA dan Bag. Organisasi
			1.2.2 Tersusunnya kode etik/aturan Perilaku Pegawai.	Perbub No. 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemda..	V					Perbub No. 32 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA di Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.	Bag Org/BKD

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	PROGRAM PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN										
1	Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturanperundang-undangan yang dikeluarkan Pemda.	1.1 AdanyaSOP/ Pedoman penyusunan peraturan Perundang-undangan.	1.1.1 AdanyaSOP/ Pedoman penyusunan atau pembentukan peraturan.	92 Peraturan Bupati, 430 Kep. Bupati, 3 Instruksi Bupati	V	V	V	V	V	SK Sekda No. 061/3843 tahun 2011 tentang SOP Sekretariat Daerah, diantaranya menetapkan SOP Penyusunan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati.	Bagian Hukum
		1.2 SOP mengakomodir langkah penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat.	1.2.1 Secara spesifik dan substansi telah menegaskan Kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, kejelasan rumusan (agar tidak tumpang tindih, disharmonis), Keterbukaan.	92 Peraturan Bupati, 430 Kep. Bupati, 3 Instruksi Bupati	V	V	V	V	V	SK Sekda No. 061/3843 tahun 2011 tentang SOP Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
		1.3 Pelaksanaan proses pengkajian dan penyusunan peraturan telah didukung routing slip/ laporan/ Simpulan.	1.3.1 Hasil proses pengkajian/penyusunan peraturan yang didukung (laporan/routing slip).	3 kajian	V	V	V	V	V	Penyusunan Naskah akademis sebagai dasar pembuatan Raperda.	Bagian Hukum

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi Internal Pemda.	1.1 Struktur Organisasi dengan Pembagian Tugas dan Fungsi yang Jelas dan Tidak Tumpang Tindih.	1.1.1 Terlaksananya Evaluasi Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi kelembagaan Internal Pemda.	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	V	V	V	V	V	Evaluasi Kelembagaan	Bag Organisasi
			1.1.2 Terlaksananya Evaluasi Tumpang Tindih Rencana Kerja Tahunan Unit Organisasi Internal Pemda.	Musrenbang Th 2018, desk penyusunan KUA PPAS TA.2019 dan desk penyusunan KUA PPAS Perubahan 2018	V	V	V	V	V	evaluasi perencanaan mulai dari musrenbang s/d desk penyusunan RKA	Bappeda
		1.2 Terbentuknya Organisasi dengan Ukuran yang tepat (Right Size).	Terlaksananya kajian pengembangan/perampingan organisasi yang ditindaklanjuti.	Kajian penilaian beban kerja urusan, kajian kelembagaan urusan kebudayaan	V	V	V	V	V	Evaluasi kelembagaan	Bag Organisasi
2	Meningkatnya kapasitas Pemda dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi.	2.1 Terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat.	2.1.1 Pemda memiliki informasi formasi dan kompetensi pegawai yang diperlukan serta dapat memenuhi kebutuhan tersebut.	Perbub No 74 Th 2010 jo Perbub No 21 Th 2011 Perbub No 25 Th 2009	V	V	V	V	V	Perbub No 74 Th 2010 jo Perbub No 21 Th 2011 Perbub No 25 Th 2009	Bag Organisasi dan BKPP

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA										
1	Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.	1.1 Terbangunnya manajemen pemerintahan berbasis TI.	1.1.1 Terbentuknya komitmen Pemda terhadap penyelenggaraan manajemen berbasis TI.	Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja berbasis TI.	V	V	V			Perbub/SK Grand design pengembangan TI.	Dinas Kominfo
2.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.	2.1 Terlaksananya seluruh tugas dan fungsi pemda sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan.	2.1.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan SOP terhadap uraian jabatannya dan implementasinya.	Perbup No.45 Th, 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingk Pemda	V	V	V	V	V	Perka SKPD ttg SOP	Bag.Org/semua SKPD
			2.1.2 Tingkat harmonisasi SOP antar unit kerja/bagian pemda.	Belum	V	V	V	V	V	Pedoman evaluasi SOP,Pelaksanaan Evaluasi SOP dan TL.	Bag. Org
3.	Meningkatnya Kinerja Pemda	3.1 Terbangunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan RPJMD.	3.1.1 Tingkat keselarasan pengembangan IKU dengan strategi yang ditetapkan.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2022	V	V	V	V	V	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2022	Bag. Org
E	PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR										
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Pemda.	1.1 Pengelolaan SDM telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1.1.1 Pengelolaan SDM telah mengacu pada peta, uraian jabatan, peringkat jabatan (job grading) dan harga jabatan (jobpricing)	Telah dilaksanakan analisa jabatan dan analisa beban kerja oleh Bagian Organisasi Setda	V	V	V	V	V	Dokumen Analisis Jabatan (peta dan uraian jabatan)	BKPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang sesuai dengan tujuan instansi.	Telah dilakukan proses Reviu Evaluasi Jabatan (Kelas dan Nilai Jabatan) dari Kelembagaan sebelum PP No. 18 Tahun 2016	V*	V**				*)Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Jabatan (Kelas dan Nilai Jabatan); **)Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan.	BKPP
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur.	2.1 Terbangunnya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel.	2.1.1 Kebijakan rekrutmen yang dilengkapi dengan instrumen implementasi.	Tidak ada rekrutmen pegawai	V	V	V	V	V	- SK Bupati tentang Penetapan Formasi, SK Panitia Seleksi CPNS Daerah dan SK Penetapan Kelulusan Seleksi CPNS Daerah.	BKPP
			2.1.2 Rekrutmen pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak ada rekrutmen pegawai	V	V	V	V	V	Pelaksanaan Rekrutmen sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017, Permenpan dan Perka BKN terkait seleksi penerimaan CPNS.	BKPP
		2.2 Pola karier pegawai, mutasi dan promosi telah disusun dan dilaksanakan dengan transparan.	2.2.1 Pola karier pegawai, mutasi dan promosi telah disusun dan dilaksanakan dengan transparan.	Pengisian jabatan promosi dan mutasi struktural melalui pemetaan potensi dan kompetensi. Metodenya dilakukan melalui assesment centre atau wawancara.	V	V	V	V	V	Pedoman tentang pengisian jabatan pengawas, administrator dan JPT Pratama, Perbup tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana, Pengawas, Administratur dan JPT Pratama.	BKPP
				Untuk mutasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai kualifikasi dan kompetensi.	V	V	V	V	V		BKPP

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
						Mutasi jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan formasi jabatan.	V	V	V	V	V		BKPP
						Mutasi keluar/masuk.	V	V	V	V	V		BKPP
3.	Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing Pemda.	3.1	Penerapan PP 53 tahun 2010 tentang Displin PNS.	3.1.1	Sosialisasi dan penerapan atas PP 53 tahun 2010 telah dilakukan kepada seluruh pegawai.	Sosialisasi UU ASN dan review PP No.53 Th. 2010 kepada 150 orang	V	V	V	V	V	Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 kepada seluruh PNS	BKPP
4.	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing-masing Pemda.	4.1	Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur.	4.1.1	Kebijakan telah disusun dan disahkan sebagai pedoman pelaksanaan penilaian kinerja individu.	Sosialisasi dan pendampingan Penilaian Kinerja di masing-masing perangkat daerah	V	V	V	V	V	Perbup tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan Penilaian Pretasi Kerja bagi jabatan fungsional	BKPP
						Surat Edaran Bupati terkait Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai						Sosialisasi dan pendampingan Penilaian Kinerja di masing-masing perangkat daerah	
				4.1.2	Diterapkan dan dimanfaatkannya informasi penilaian SKI untuk proses pengambilan keputusan.	Sudah dipergunakan dalam mekanisme kenaikan pangkat dan sebagai pertimbangan dalam pengangkatan	V	V	V	V	V	V	Surat Edaran Bupati
		Mempergunakan SKI dalam mekanisme kenaikan pangkat dan sebagai pertimbangan dalam pengangkatan jabatan											

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
		4.2	Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat.	4.2.1	Pembangunan/pe ngembangan database pegawai sesuai dengan tujuan instansi.	Peremajaan data secara rutin	V	V	V	V	V	Perbup Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo	BKPP
												Entry SAPK, Peremajaan Simasneg	
				4.2.2	Database pegawai dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.	Updating data untuk sinkronisasi data Simasneg dan SAPK untuk data jabatan	V	V	V	V	V		BKPP
5.	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing Pemda.	5.1	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan.	5.1.1	Terdapat dokumen Standar Kompetensi Jabatan.	Sudah ditetapkan Perbup Nomor 48 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Pratama, Administrator, Dan Pengawas Pada Pemerintah Daerah	V	V	V	V	V	Perbup Nomor 48 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Pratama, Administrator, Dan Pengawas Pada Pemerintah Daerah Seleksi JPT Pratama dengan menggunakan SKM	BKPP
				5.1.2	Pengangkatan Pejabat untuk Jabatan tertentu sesuai dengan standar kompetensi.	Digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Tim Penilai Kinerja (TPK)	V	V	V	v	v	Kesesuaian antara kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabat yang menduduki jabatan tersebut.	BKPP

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
		5.2	Tersedianya peta profil kompetensi individu.	5.2.1	Terdapat Unit Organisasi atau kerjasama dengan pihak lain yang melakukan fungsi assesment center.	Telah dilaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga assessment center	V	V	V	v	v	Pedoman tentang pengisian jabatan pengawas, administrator dan JPT Pratama, Assesment Center (Adanya Tim Penilai Kompetensi/TPK atau Unit Penilai Kompetensi/UPK) Profil Kompetensi PNS.	BKPP
				5.2.2	Terdapat dokumen atau database profil kompetensi setiap pegawai.	Terdapat profil setiap pegawai di Pemkab. Kulon Progo	V	V	V	v	v	Perbup Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo	BKPP
							V	V	V	v	v	Pemutakhiran profil semua Pegawai	
		5.3	Terbangunnya sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi.	5.3.1	Terdapat Kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan pelaksanaan diklat pegawai berbasis kompetensi.	Dokumen Analisa Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Prioritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	V					Perbup tentang Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Prioritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	
							V	V	V	V	V	Pengiriman peserta fasilitasi diklat prajabatan, teknis, fungsional dan penjenjangan struktural (Diklatpim)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Diklat Penatausahaan Aset Daerah (1 orang)			V			Pengiriman peserta Penatausahaan Aset Daerah	BKPP (Diklat)
				Diklat Khusus Provesi Advocat (2 orang)							
				Diklat Calon Kepala Sekolah (86 orang)	V		V			Swakelola penguatan Calon Kepala Sekolah	
				Diklat Probitry Audit (3 orang)							
				Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian (1 orang)							
				Diklat PPNS (2 orang)	V					Pengiriman peserta PPNS	
				Diklat Pelayanan Prima (40 Orang)	V			V		pengiriman peserta Pelayanan Prima	
				Diklat Managemen Pengelolaan Koperasi (2 orang)							
				Diklat PBJ (50 orang)	V	V	V	V	V	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Kerjasama dengan LKPP	
				Diklat Pengendalian Dampak Lingkungan (1orang)							
				Diklat Pim IV (43 orang)	V	V	V	V	V	Pengiriman Diklatpim IV ke Bandiklat DIY	

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
						Diklat Pim III (13 orang)	V	V	V	V	V	Pengiriman Diklatpim III ke bandiklat DIY	
				5.3.2	Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan yang sudah dibakukan.	Inventarisasi, Identifikasi dan Sosialisasi Kebutuhan Diklat di lingkungan Pemkab Kulon Progo			V			Perbup tentang Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan Prioritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	
						Tubel 12 orang, lbel 86 orang, Pengiriman Diklatpim Tk II 3 orang, Pengiriman Diklatpim Tk III 24 orang, Pengiriman Diklatpim Tk IV 39 orang	V					Perbup tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar	
F	PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN												
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing Pemda.	1.1	Kegiatan perencanaan ,pelaksanaan dan pertanggungjawa ban keuangan negara pada pemda sesuai dengan aturan yang berlaku.	1.1.1	Adanya rencana kerja dan anggaran pada pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2022	V	V	V	V	V	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2022	Bappeda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.1.2 Pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan aturan yang berlaku.	Pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan Pedoman pengelolaan keuangan daerah.	V	V	V	V	V	Pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan Pedoman pengelolaan keuangan daerah.	BKAD
			1.1.3 Pertanggungjawaban keuangan telah sesuai aturan yang berlaku.	Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan	V	V	V	V	V	Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Keuangan telah sesuai ketentuan.	BKAD
		1.2 Terselenggaranya SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.	1.2.1 Hasil evaluasi SPIP bernilai baik.	Perbub N0.44 Th 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingk Pemda		V	V	V	V	Perbub Ttg SPIP dan SK satgas sdh ada.	Bag Org
				SK Bupati No.77 Th 2011 ttg Perubahan Kep. Bupati No. 33 Th 2010 ttg Pemb. Satgas SPIP							
		1.3 Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Pemda meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara.	1.3.1 Adanya kegiatan Assurance (monitoring, evaluasi, dan compliance audit) dan Consulting (sosialisasi, bimtek) tentang pengelolaan keuangan.	Perbup No.1 Th 2014 ttg Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah		V	V	V	V	Peningkatan jumlah kegiatan konsulting dan kegiatan Assurance tentang pengelolaan keuangan.	Irda/BKAD
2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing Pemda.	2.1 Pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana.	2.1.1 Output yang dihasilkan telah dimanfaatkan.	Pemeriksaan dengan semua SKPD	V	V	V	V	V	pemanfaatan output belanja modal dan output kegiatan telah sesuai dengan rencana.	Irda/BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2.1.2. Realisasi pendapatan dan belanja negara sesuai dengan target rencana kerja dan anggaran.	Realisasi APBD 2017 s/d Triwulan IV, Belanja sejumlah Rp. 1. 430.666.215.922,60 (95,36%). Penerimaan Rp. Rp. 1. 425.084.347.389,05 (98,50%)	V	V	V	V	V	Penyerapan anggaran di atas 90 %/Penerimaan Daerah di atas 90 %.	BKAD
3.	Meningkatnya status opini BPK.	3.1 Meningkatnya opini BPK atau tetap dipertahankan opini WTP.	1.1.1 Adanya peningkatan opini BPK atau tetap diperoleh opini BPK dan ditindaklanjuti rekomendasi BPK.	Opini WTP pada Tahun 2013-2017	V	V	V	V	V	Opini BPK WTP tanpa catatan	BKAD
		3.2 Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Pemda meningkatkan status opini laporan keuangan.	3.2.1 Adanya kegiatan Assurance (monitoring, evaluasi, dan compliance audit) dan Consulting (sosialisasi, bimtek) terhadap penyusunan laporan keuangan.	Buril pada semua SKPD	V	V	V			Jumlah kegiatan assurance dan konsulting meningkat di banding tahun sebelumnya.	Irda
4.	Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.	4.1 Implementasi program anti korupsi.	4.1.1 Terlaksananya implementasi program anti korupsi.	Penandatanganan naskah kebulatan tekad Muspida Plus, SKPD dan BUMD Kab. KP	V					Penandatanganan pakta integritas oleh semua SKPD.	Bag Hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4.1.2 Terdapat kebijakan whistle blowing yang dijalankan dengan transparan dan konsisten.	Peetapan 4 SKPD sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)		V				RAD PPK	Irda
		4.2 Meningkatnya implementasi E-Procurement barang dan jasa.	4.2.1 Proses pelelangan umum dan seleksi umum dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik.	Terlaksananya proses pelelangan umum dan seleksi umum secara elektronik, sesuai dengan perencanaan yaitu lelang jasa konstruksi sebanyak 144 paket, lelang barang/jasa lainnya sebanyak 34 paket dan seleksi (lelang jasa konsultasi) sebanyak 49 pakeet. Total 227 paket selesai lelang	V	V	V			Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan barang/ Jasa Secara Elektronik.	Bagian Layanan Pengadaan dan Dinas Kominfo
				Terselenggaranya sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sistem rencana umum pengadaan (SIRUP) bagi PPK dan admin SIRUP di SKPD Lingkup Kab. Kulon Progo							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Terselenggaranya sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa bagi Pokja, PPK dan penyedia barang/jasa di Lingkup Kab. Kulon Progo							
G	PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA										
1.	Meningkatnya Kinerja Pemda.	1.1 Adanya IKU pada Pemda	1.1.1 Tercapainya IKU Pemda	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2022	V	V	V	V	V	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2022	Bappeda/Bag. Organisasi
			1.1.2 Evaluasi periodik atas ketercapaian target IKU.	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja secara berkala (Triwulanan)	V	V	V	V	V	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja secara berkala (Triwulanan)	Bappeda/Bag. Organisasi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemda.	2.1 Terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.	2.1.1 Adanya sistem manajemen kinerja terpadu dalam pelaksanaan tupoksi pemda yang tercermin dengan adanya RENSTRA, Rencana Kinerja, IKU, sistem	Perbup No.8 Th 2014 ttg SAKIP pada Pemda		V				Perbup No.8 Th 2014 ttg SAKIP pada Pemda	Bagian Organisasi
			2.1.2 SKI disusun sebagai cascading dari kinerja organisasi.	Sosialisasi dan Pendampingan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan cascading kinerja organisasi			V			Surat Edaran Bupati terkait Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai	BKPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					V	V	V	V	V	Sosialisasi dan pendampingan Penilaian Kinerja di masing-masing perangkat daerah	
			2.1.3 Terdapatnya Pusat Layanan Pengaduan Masyarakat.		V	V	V	V	V	SIM Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	Dinas Kominfo
			2.1.4 Terdapatnya Layanan Informasi berbasis web.		V	V	V	V	V	kulonprogokab.go.id	Dinas Kominfo
			2.1.5 NilaiPenyajian informasi (dalam web) sesuai dengan Daftar Informasi Publik (Standar Prosedur Pelayanan Informasi) dan UU Keterbukan Informasi Publik.		V	V	V	V	V	Penyajian inforamsi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Dinas Kominfo
			2.1.6 Terdapatnya pusat layanan informasi publik.		V	V	V	V	V	Layanan informasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).	1.1 Terselenggaranya pelayanan publik yang murah/ terjangkau, pasti waktunya dan jelas prosedur pelayanannya.	1.1.1 Adanya Standar Pelayanan dan Quick Wins pelayanan unggulan.	Perbub No.55 Th 2014 ttg Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (merevisi Perbub No.20/ 2012 ttg Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik)	V	V	V	V	V	Perbub No. 56 Th 2007 KPT Perbub No. 53 Th 2009 Kec Perbub No. 32 Th 2010 Naker Perbub No. 33 Th 2011 Penanaman modal.	Bag.Org
			1.1.2 Sosialisasi Standar Pelayanan (internal/ eksternal).	Sosialisasi Perbup 55/ 2014	V	V	V	V	V	sosialisasi pada papan informasi dan dengan metode tatap muka.	Bag.Org
			1.1.3 Implementasi Standar Pelayanan.	SKPD Pelayan publik	V	V	V	V	V	Semua SPP telah diimplementasikan.	SKPD Pelayanan Publik
			1.1.4 Adanya kerjasama/ kolaborasi dalam bidang pelayanan dengan pihak lain.		V	V	V	V	V	Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu penyelenggaraan perizinan / Perbub Hubungan kerja pelayanan kesehatan.	
			1.1.5 Ada/ Tidak kegiatan evaluasi kinerja pelayanan.		V	V	V	V	V	Laporan Hasil Evaluasi (LHE).	Irda
2.	Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.	2.1 Unit pelayanan telah berstandar internasional	2.1.1 Diperolehnya sertifikasi unit/bidang pelayanan berstandar internasional.	Belum		V	V	V	V		Bag.Org

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.	3.1 Terimplementasikannya metode survai kepuasan pelanggan yang efektif (vide SK Menpan Nomor 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004.	3.1.1 Tersedianya Angka Indeks Kepuasan Masyarakat/Pelanggan.	42 unit pelayanan publik, dengan hasil BAIK (36 unit), AMAT BAIK (1 unit)	V	V	V	V	V	Laporan IKM	Bag.Org
		3.2 Terbangunnya sistem penanganan keluhan,saran dan masukan.	3.2.1 Keberadaan Sistem dan prosedur Penanganan Keluhan, Saran, dan Masukan.	Perbup No.55, Th 2014	V	V	V	V	V	SOP aduan Masyarakat telah diatur dalam setiap perbub SPP.	Bag.Org
		3.3 Terbentuknya imej positif terhadap terhadap organisasi.	3.3.1 Terbangunnya strategi kehumasan untuk peningkatan imej organisasi.		v	v	v			Kebijakan Strategi Kehumasan (SOP konfrensi pers).	

Wates, 1 November 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO